



PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK
**DINAS KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**

Jalan dr. Wahidin Sudirohusodo No. 241 Gresik Jawa Timur 61124
Telp. (031) 3951240 Pos-el : kbpp@gresikkab.go.id

Gresik, 29 Juli 2025

Nomor : 050/642/437.79/2025
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) bendel
Hal : Penyampaian Dokumen Perubahan RKPD Tahun 2025

Yth. Sdr. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan,
Penelitian dan Pengembangan Daerah
Kabupaten Gresik
di
GRESIK

Menindaklanjuti Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Gresik Nomor : 050/1074/437.71/2025 tanggal 22 Juli 2025 perihal sebagaimana pada pokok surat, bersama ini kami kirimkan Dokumen Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 sebagaimana terlampir.

Demikian untuk menjadikan pemeriksaan dan atas kerjasamanya disampaikan terima kasih.

KEPALA DINAS KELUARGA
BERENCANA, PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN
ANAK KABUPATEN GRESIK



dr. TITIK ERNAWATI, M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 19760903 200701 2 010

PERUBAHAN RENCANA KERJA TAHUN 2025

DINAS KELUARGA BERENCANA,
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN GRESIK



KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, atas segala rahmat dan hidayahnya sehingga penyusunan Rencana Kerja Tahunan Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KBPPPA) Kabupaten Gresik tahun 2025 dapat diselesaikan dengan baik.

Perubahan Rencana Kerja Tahunan Dinas KBPPPA Kabupaten Gresik tahun 2025 merupakan dokumen induk rencana jangka pendek Dinas KBPPPA Kabupaten Gresik yang disusun sesuai untuk menyempurnakan Rencana Kerja Tahunan 2025 dan berdasarkan Surat Edaran Bupati Gresik Nomor 329 / 437.61 / 2025 tentang Efisiensi Belanja APBD Tahun 2025 dan Perubahan Rencana Strategis 2021-2026 Dinas KBPPPA Kabupaten Gresik.

Dokumen ini merupakan salah satu instrument pertanggungjawaban dalam melaksanakan mandat yang diemban Dinas KBPPPA Kabupaten Gresik.

KEPALA DINAS KELUARGA BERENCANA,
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN GRESIK



dr. Titik Ernawati, M.H.

Pembina Utama Muda (IV-c)

NIP. 19760903 200701 2 010



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	1
DAFTAR ISI.....	2
DAFTAR TABEL	3
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum	3
1.3 Maksud dan Tujuan.....	4
1.4 Sistematika Penulisan.....	5
BAB II.....	6
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN GRESIK TRIWULAN I TAHUN 2025	6
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gresik Triwulan I Tahun 2025	6
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan OPD	28
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD	31
BAB III.....	34
RENCANA KERJA & PENDANAAN	34
3.1 Program dan Kegiatan	34
BAB IV PENUTUP	57



DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Hasil Laporan Monitoring Capaian Kinerja Triwulan I TA 2025.....	7
Tabel 2. 2 (T-C.30) Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	30
Tabel 2. 3 Target Indeks Pemberdayaan Gender di Kabupaten Gresik ..	31
Tabel 2. 4 Target Sasaran Strategis di DKBPPPA Tahun 2021-2026	31
Tabel 3.1 RENJA OPD KBPPPA Kab. Gresik Tahun 2025	35



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas KBPPPA Kabupaten Gresik Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan tahunan sebagai penjabaran dari Rencana Strategis Dinas KBPPPA Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026 sebagai bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gresik Tahun 2021–2026 dalam urusan Keluarga Berencana dan Pengendalian Penduduk serta urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Oleh karena itu, Perubahan Rencana Kerja Dinas KBPPPA Kabupaten Gresik Tahun 2025 disusun mengacu pada Perubahan Rencana Kerja Pemertintah Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2025 dan Review Rencana Strategis dinas KBPPPA Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026.

Sebagai dokumen perencanaan tahunan, Perubahan Rencana Kerja Dinas KBPPPA Kabupaten Gresik tahun 2025 memuat uraian tujuan, sasaran, program dan kegiatan tahun 2025 sebagai bahan bagi penyusunan RKPD Kabupaten Gresik Tahun 2025 dan sebagai pedoman bagi Dinas KBPPPA Kabupaten Gresik untuk menyusun Perubahan DPA Tahun 2025 untuk digunakan sebagai bahan penyusunan Rancangan PAPBD Kabupaten Gresik Tahun 2025.

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas KBPPPA Kabupaten Gresik Tahun 2025 disebabkan beberapa hal diantaranya yaitu : Instruksi Presiden No 1 Tahun 2025 dan Surat Edaran Bupati Gresik Nomor 329 / 437.61 / 2025 tentang Efisiensi Belanja APBD Tahun 2025, sehingga perlu dilakukan penyesuaian kegiatan, termasuk diantaranya penundaan beberapa kegiatan terkait pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang tidak memiliki sumber dana selain APBD.



1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja Dinas KBPPPA Kabupaten Gresik Tahun 2025 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2012;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
7. Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025
8. Peraturan Bupati Gresik Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gresik;
9. Peraturan BupatiSi Gresik Nomor 16 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 75 Tahun 2024 Tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2025;
10. Peraturan Bupati Gresik Nomor 27 Tahun 2025 Tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025



1.3 Maksud dan Tujuan

Perubahan Rencana Kerja Dinas KBPPPA Kabupaten Gresik Tahun 2025 memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang disusun sebagai bahan penyusunan Perubahan Kinerja Dinas KBPPPA Kabupaten Gresik Tahun 2025 dan Rancangan PAPBD Kabupaten Gresik Tahun 2025.

Adapun tujuan disusunnya Perubahan Rencana Kerja Dinas KBPPPA Kabupaten Gresik Tahun 2025 adalah sebagai pedoman bagi Dinas KBPPPA Kabupaten Gresik untuk menyusun Rencana Kerja dan Anggaran yaitu RKA-PAPBD Tahun 2025.

1.4 Sistematika Penulisan

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas KBPPPA Kabupaten Gresik Tahun 2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja OPD agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TRIWULAN KE-I TAHUN 2025

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas KBPPPA Kabupaten Gresik Triwulan I tahun 2025 dan perkiraan capaian tahun 2026 yang mengacu pada APBD tahun 2026 yang dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Dinas KBPPPA Kabupaten Gresik berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Dinas KBPPPA Kabupaten Gresik Triwulan I Tahun 2025.

BAB III : RENCANA PROGRAM dan KERANGKA PENDANAAN

Rencana Program dan Kegiatan Perubahan Renja Tahun 2024 Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, jumlah anggaran, Lokasi, dan Total kebutuhan dana/ Pagu Indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya.

BAB IV : PENUTUP

Bab ini berisikan uraian penutup, berupa: catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan; kaidah-kaidah pelaksanaan; dan rencana tindak lanjut.

LAMPIRAN: MATRIK PERUBAHAN RENJA OPD TAHUN 2025

Lampiran memuat tabel matrik Usulan Program dan Kegiatan Rencana Kerja Dinas KBPPPA Kabupaten Gresik.



BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KAB.GRESIK TRIWULAN I TAHUN 2025

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas KBPPPA Kab.Gresik Triwulan I Tahun 2025

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas KBPPPA Kabupaten Gresik Tahun 2025 dijadikan acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) untuk ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas KBPPPA Kabupaten Gresik Tahun 2025. Berdasarkan pelaksanaan Rancangan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 Dinas KPPPA mendapatkan pagu Rp. 22.649.535.085, terdiri dari Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp. 12.694.890.000,- dan Dana Alokasi Umum (DAU) - Dana Transfer Umum sebesar Rp.9.954.645.085,-. Anggaran yang bersumber pada DAU, terdiri dari Rp.8.724.191.925,04 untuk Belanja Mengikat, termasuk gaji, tunjangan, listerik dan sebagainya. Rp. 64.108.800,00 untuk ATK penunjang DAK, dan Rp. 384.992.860,09,- untuk operasional UPT Perlindungan Perempuan dan Anak.

Dalam Implementasi Kinerja terhadap Rencana Kinerja TA 2025 selama Periode Januari – Maret 2025 Dinas KBPPPA telah melakukan penyerapan anggaran sekitar Rp. 1.857.617.711,85,- dari Rp. 22.649.535.085,.

Capaian kinerja Triwulan I TA 2025 tersebut, dijadikan acuan untuk menentukan target kinerja program dan kegiatan pada tahun 2025, agar target capaian indikator sampai dengan tahun terakhir Rencana Strategis (tahun 2025) dapat tercapai. Data tersebut dapat dilihat pada tabel 2.1 di bawah ini:



Tabel 2. 1 Hasil Laporan Monitoring Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2025

	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d Renja Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang di evaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2026 (%)		
					K	Rp.	K	Rp.	I		II		III			IV		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
1	3	4	5	6	8		9		10		11		12		13		14=10+11+12+13		15=14/9x100		16= 8+14		17= 16/7x100		
		DINAS KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK				24.015.259.111		25.083.594.977		1.857.617.712		-		-			-	1.857.617.712	115	7,41		25.872.876.823		143,26	
1	Mengendalikan Laju Pertumbuhan Penduduk Dimbangi Meningkatnya Pengarusutamaan Gender dan Perlindungan Terhadap Perempuan dan Anak	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				24.015.259.111		25.083.594.977		1.857.617.712		-		-			-	1.857.617.712	115	7,41	84	25.872.876.823	102	143,26	
I		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK				3.051.243.698		3.612.616.000		81.063.395,00		-		-			-	81.063.395,00	124	2,24	17,47	3.132.307.093	123,76	17,47	
	Meningkatkan kualitas dan aksesibilitas pelayanan dasar secara inklusif dan berkeadilan gender	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase Usulan Perempuan yang Telah Diakomodasi dalam Musrenbang, Musrenbangdes dan Forum OPD	Persen	43,28	683.779.010	20,00	898.000.000	20,00	16.780.500	23,91	-	24	-		40	-	60,00	16.780.500	300	1,87	102	700.559.510	291,43	58,05
a		Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah OPD yang telah melakukan ARG pada minimal 30% Anggarannya	Perangkat Daerah	55	180.428.480	30,00	276.000.000	30,00	994.500	30,00	-	30	-		30,00	-	30	994.500	100	0,36	102	181.422.980,00	185,45	61,96
1	Terlaksananya Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota	Perangkat Daerah	55	180.428.480	55	276.000.000	47	994.500	47	-	47	-	1	47		47	994.500	85	0,36	102	181.422.980,00	185,45	59,57
b		Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Desa Yang Telah Memfasilitasi Kegiatan Kelompok Perempuan dalam APBDes	Desa	5,00	220.071.500	45	230.000.000	0	-	0	-	-	-	34		-	34	-	76	0,00	17	220.071.500,00	116	35,42
c		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga / kelompok masyarakat yang difasilitasi							15.786.000					1			15.786.000							
2		Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	4	0	4	-	0	0		0	0		1			0	0	0	4	-	100	-	
3		Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	organisasi	17,00	220.071.500	17	230.000.000,00	0	-	0	-	17	-	1	17		17	0	100	0,00	17	220.071.500,00	100	171,17
c		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga / kelompok masyarakat yang difasilitasi	orang	10,00	283.279.030	10	392.000.000,00	0	-	3	-	3	-	3		-	3	-	30	0	10	283.279.030,00	100,00	96,74
		Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	orang	994	283.279.030	675	392.000.000,00	0	-	0	-	675	-	1	675		0	0	0	994	283.279.030,00	147,26	102.451,73	



Perubahan Rencana Kerja Dinas KBPPPA Tahun 2025

Peningkatan inklusivitas penyandang disabilitas, fakir miskin, anak yatim, dan anak-anak terlantar yang komprehensif melalui penyelenggaraan program kesejahteraan sosial yang efektif, penyelenggaraan sistem pendidikan inklusi, pelatihan vokasi dan peningkatan kesempatan kerja	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Yang Berhasil Diselesaikan	Persen	88,78	275.148.470,00	96	353.379.000,00	80	30.897.700	80	-	-	-	-	89,94	-	94	30.897.700	98	8,74	182,47	306.046.170,00	96,33	35,82
	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah OPD yang telah berkoordinasi dan melakukan sinkronisasi dalam melakukan pencegahan kekerasan.	OPD		47.525.500,00	30	50.750.000,00	30,00	-	30,00	-	30	-	-	30,00	-	30,00	-						
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen		47.525.500	1	50.750.000,00	1,00		1,00	-	1	-	1	1,00		1,00	0						
	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan yang berhasil diselesaikan	kasus	100,00	167.665.670	115	199.544.000,00	23	12.306.100,00	31	-	46	-	-	52	-	152,00	12.306.100,00	132	6,17	232	179.971.770,00	202	38,85
	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten / Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan	orang	125	62.394.370	100	92.305.000,00	10	12.306.100	30	-	30	-	1	30		100,00	12.306.100	100	13,33		74.700.470,00	100,00	16,65
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan penyediaan layanan Rujukan Lanjutan bagi perempuan kekerasan kewenangan kabupaten/kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	dokumen	100	105.271.300	20	107.239.000,00	0	-	10	-	20	-	1	20		0	0	0	0,00		105.271.300,00	50,00	419,13
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga / kelompok masyarakat yang difasilitasi	lembaga	10,00	59.957.300	10	103.085.000,00	10	18.591.600	10	-	10	-	-	10	-	10	18.591.600	100	18,04	10	78.548.900,00	100,00	21,46
	Peningkatan Kapasitas Sumber daya lembaga penyedia layanan penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah OPD yang telah berkoordinasi dan melakukan sinkronisasi dalam melakukan pencegahan kekerasan.	rangkat Dae	100	26.536.300	95	27.420.000,00	0		0		-	-	1	40		40	0	42	0,00		26.536.300,00	40,00	-
	Penyediaan kebutuhan spesifik bagi perempuan dalam situasi darurat dan kondisi khusus kewenangan kab/ kota	Jumlah Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Spesifik	orang	98	33.421.000	100	75.665.000,00	23	18.591.600	41	-	38	-	1	50		152	18.591.600	152	24,57	250	52.012.600,00	250	35,53



Perubahan Rencana Kerja Dinas KBPPPA Tahun 2025

	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Persentase sasaran yang pendapatannya meningkat dari tahun sebelumnya	Persen	77	1.356.237.716	10	1.500.000.000,00	27,25	-	27,25	-	27	-	9,58	-	9,58	-	96	0,00	0,00	1.356.237.716,00	91,33	9,26
	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah keluarga sasaran yang pendapatannya diatas garis kemiskinan	orang	16	1.356.237.716	16	1.500.000.000,00	16	-	16	-	16	-	23	-	23	0	144	0,00	16,00	1.356.237.716,00	100,00	9,26
	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	laporan	16	1.356.237.716	16	1.500.000.000,00	8	-	8	-	8	-	1	8	16	0	100	0,00	16	1.356.237.716,00	100,00	9,26
	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Persentase Ketersediaan Data Gender dan Anak mengacu pada indikator PermenPPPA Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Data Gender dan Anak	Persen	0,91	0	70	-	61,25	0	61,25	0	61	-	-	-	61,25	0	88	0,00	-	0,00	-	
	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah data yang tersedia	variabel	2,00	0	2	-	0	0	0	-	1	-	-	0	0	0	0	0,00	2	-	100,00	-
	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak yang Tersedia	dokumen	0	0	1	-	0	0	0	-	1	-	-	0	0	0	0	0,00	-	0	0	
	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Nilai Klaster Kelembagaan pada Penilaian Mandiri Kabupaten Layak Anak	poin	25,24%	367.244.005	140	430.468.000,00	125,50	14.300.000	125,50	-	125	-	152,65	-	109,04	14.300.000	78	3,32	78	381.544.005,00	55,63	59,91
	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Indikator KLA yang telah ditindaklanjuti oleh OPD/ Perusahaan / Lembaga Masyarakat	Indikator	7	367.244.005	8	152.021.000,00	7	900.000	7	-	7	-	7,00	-	7,00	900.000	88	0,59	368.144.005,00	-	201,16	
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	organisasi	82	128.831.905	82	152.021.000,00	20	900.000	40	-	22	-	1	-	82,00	900.000	100	0,59	164	129.731.905,00	200,00	118,14
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	dokumen		0	4	-	-	55	-	55	-	1	-	0	0	0	0	-	-	-	-	
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Ramah Anak Yang Sudah Diselenggarakan	jenis	7	238.412.100	7	278.447.000,00	68	13.400.000	68	-	68	-	68,00	-	68,00	13.400.000	971	4,81	251.812.100,00	-	55,48	
	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	orang	240	0	100	-	0	-	0	-	-	1	-	0	0	0	0	240	-	240,0	-	
	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	dokumen	7	238.412.100	7	278.447.000,00	2	13.400.000,00	2	-	2	-	1	7	7	13.400.000	100	4,81	14	251.812.100,00	200,00	189,19



Perubahan Rencana Kerja Dinas KBPPPA Tahun 2025

		PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase Kasus Kekerasan terhadap Anak yang Berhasil Diselesaikan	Persen	0,52	368.834.497	100	430.769.000,00	20	19.085.195,00	20	-	20	-		83,77	-	84	19.085.195,00	84	4,43	84,30	387.919.692,00	84,30	71,35
		Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah OPD yang telah berkoordinasi dan melakukan sinkronisasi dalam melakukan pencegahan kekerasan	lembaga		48.047.500	30	50.750.000,00	0	0	0	0	30	0		30,00	0	0,00	0	0	0,00		48.047.500,00	-	265,87
		Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA	Jumlah SDM yang memperoleh advokasi dan Pendampingan dalam pelaksanaan kebijakan /program/kegiatan pencegahan KTA	orang	0,00	48.047.500	17	50.750.000,00	0	0	0	0	0	-	1	17		17,00	0	100	0,00		48.047.500,00		
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	dokumen	0	0	3	-	0	0	0	0		1			0	0	0	0		-	-		
	Tersedianya Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah SDM yang memperoleh advokasi dan Pendampingan dalam pelaksanaan kebijakan /program/kegiatan pencegahan KTA	orang	6	0	6	-	0	0	0	0		1			0	0	0	0	6	-	-		
		Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kasus Anak Dalam Situasi Khusus Yang Berhasil Diselesaikan	Kasus	0,89	279.186.997	80	338.419.000,00	19	19.085.195	20	-	21	-		31	-	91,00	19.085.195	114	5,64		298.272.192,00	-	56,75
		Penyediaan layanan pengaduan masyarakat bagi anak yg memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah kab/ kota	Jumlah Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Mendapatkan Layanan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	orang	249	151.391.934	100	210.178.000,00	25	19.085.195	25	-	25	-	1	25		100,00	19.085.195	100	9,08	349	170.477.129,00	349,00	46,59
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	kasus	0	0	20	-	0	0	0	0		1			0	0	0	0		-	-		
		Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	dokumen	0	0	5	-	0	0	0	0		1			0	0	0	0		-	-		
		Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan	anak	0	127.795.063	100	128.241.000,00	25	-	25	-	25	-	1	25		100,00	0	100	0,00		127.795.063,00		
		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan bagi anak yang mendapatkan perlindungan khusus	lembaga	1	41.600.000	2	41.600.000,00	0		1	-	1	-		1,00	-	2	-	100	0,00		41.600.000,00	-	
	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peningkatan Kapasitas bagi Sumber Daya Lembaga	kali	0	0			0		-	-	-	1			0	0	0	0,00		-	-	-	
		Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten	Jumlah SDM Penyedia Layanan yang terlatih dan mendapatkan sertifikat Perlindungan dan Penanganan AMPK	orang	0	41.600.000	5	41.600.000,00	0		40	-	-	-	1	40		40	0	800	0,00		41.600.000,00		-



	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Persentase Program OPD yang sudah terfasilitasi	Persen	100,00	6.162.760.411,06	100	6.481.033.997,00	100,00	1.586.268.435	100,00	-	-	100	-	88,89	-	89	1.586.268.435	89	24,48	89,00	7.749.028.845,91	94,50	17,93
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja	dokumen	1,00	24.923.466	1	35.950.380,00	1,00	1.680.000	1,00	-	1	-	1,00	-	1,00	1.680.000	100	4,67	2,00	26.603.466,00	40,00	79,95	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	dokumen	6	8.232.200	1	10.890.000,00	1	1.680.000	1	-	1	-	1,00	1,00	1.680.000	100	15,43	7,00	9.912.200,00	350,00	37,24		
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	dokumen	9	16.691.266	12	25.060.380,00	3	-	3	-	3	-	1	3,00	12,00	0	100	0,00	21,00	16.691.266,00	175,00	1.669,46	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah bulan gaji dan Tambahan Penghasilan PNS yang terbayar	bulan	1,94	3.917.264.467,06	12	4.066.998.946,00	3,00	1.134.580.127	6,00	-	9	-	12,00	-	3,00	1.134.580.127	25	27,90	4,94	5.051.844.593,91	41,18	109,73	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	orang	27	3.917.264.467	26	4.066.998.946,00	23	1.134.580.127	23	-	23	-	1	23	23	1.134.580.127	88	27,90	50,00	5.051.844.593,91	192,31	109,73	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah peserta pembinaan bimbingan teknis implementasi peraturan perundangan	orang	1,00	0	55	-	-	0	-	0	-	-	-	0,00	0,00	0	0	0,00	1,00	-	1,82	-	
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	orang	55	0	55	-	0	0	0	0	-	-	-	0	0	0	0	0,00	55,00	-	100,00	-	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah komponen instansi listrik dan peralatan serta perlengkapan kantor / rumah tangga yang terpenuhi	jenis	15,00	220.417.664	30	270.167.308,00	0,000	1.343.018	10,000	-	10	-	10	-	30,00	1.343.018	100	0,50	45,00	221.760.682,00	300,00	98,81	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	paket	11	2.823.500	15	2.938.375,00	0	0	0	0	15	-	1	-	15,00	0	100	0,00	26,00	2.823.500,00	86,67	70,59	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	paket	10	0	15	-	0	0	0	0	-	-	-	0	-	0	0	0,00	10,00	-	66,67	-	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	paket	8	136.448.300	10	136.726.153,00	0	834.009	10	-	10	-	1	-	10,00	834.009	100	0,61	18,00	137.282.309,00	180,00	137,30	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan Yang Disediakan	paket	6	4.111.000	8	6.378.780,00	0	509.009	4	-	4	-	1	-	8,00	509.009	100	7,98	14,00	4.620.009,00	175,00	50,04	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	dokumen	1422	0	0	-	0	-	0	-	-	-	-	0	-	0	0	0,00	1422,00	-	74,84	-	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	laporan	245	77.034.864	600	124.124.000,00	100	-	200	-	200	-	1	100	600,00	0	100	0,00	845,00	77.034.864,00	140,83	92,84	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jasa Operasional yang	orang	93	1.820.339.164	46	1.861.674.000,00	46,00	443.665.290	46,00	-	46	-	46	-	46,00	443.665.290	100	23,83	46,00	2.264.004.454,00	100,00	179,86	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	laporan	9	107.995.304	3	143.916.000,00	3	19.455.720	3	-	3	-	1	3	3	19.455.720	100	13,52	12,00	127.451.024,00	400,00	116,71	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	laporan	7	1.712.343.860	43	1.717.758.000,00	43	424.209.570	43	-	43	-	1	43	43	424.209.570	100	24,70	50,00	2.136.553.430,00	116,28	185,86	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah fasilitas pemeliharaan yang tersedia	jenis	4,00	179.815.650	4	246.243.363,00	4,00	5.000.000	4,00	-	4	-	4	-	4,00	5.000.000	100	2,03	8,00	184.815.650,00	200,00	448,12	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	unit	12	53.820.500	1	76.083.000,00	1	2.500.000	1	-	-	-	1	-	1	2.500.000	100	3,29	13,00	56.320.500,00	325,00	190,12	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	unit	8	81.550.150	30	86.930.000,00	30	2.500.000	30	-	-	-	1	-	30	2.500.000	100	2,88	38,00	84.050.150,00	1.266,67	337,40	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	gedung	3	0	1	34.155.363,00	0	0	0	0	-	-	-	0	0	0	0	0,00	3,00	-	60,00	-	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah pemeliharaan / rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor	sarana	9	44.445.000	5	49.075.000,00	0	-	0	-	5	-	1	5	5	0	100	0,00	14,00	44.445.000,00	280,00	169,74	
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik																								

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)



Perubahan Rencana Kerja Dinas KBPPPA Tahun 2025

	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Program OPD yang sudah terfasilitasi	Persen	100,00	6.162.760.411,06	100	6.481.033.997,00	100,00	1.586.268.435	100,00	-	100	-	-	88,89	-	89	1.586.268.435	89	24,48	89,00	7.749.028.845,91	94,50	17,93
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja	dokumen	1,00	24.923.466	1	35.950.380,00	1,00	1.680.000	1,00	-	1	-	-	1,00	-	1,00	1.680.000	100	4,67	2,00	26.603.466,00	40,00	79,95
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	dokumen	6	8.232.200	1	10.890.000,00	1	1.680.000	1	-	1	-	1	1,00	-	1,00	1.680.000	100	15,43	7,00	9.912.200,00	350,00	37,24
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	dokumen	9	16.691.266	12	25.060.380,00	3	-	3	-	3	-	1	3,00	-	12,00	0	100	0,00	21,00	16.691.266,00	175,00	1.669,46
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah bulan gaji dan Tambahan Penghasilan PNS yang terbayar	bulan	1,94	3.917.264.467,06	12	4.066.998.946,00	3,00	1.134.580.127	6,00	-	9	-	-	12,00	-	3,00	1.134.580.127	25	27,90	4,94	5.051.844.593,91	41,18	109,73
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	orang	27	3.917.264.467	26	4.066.998.946,00	23	1.134.580.127	23	-	23	-	1	23	-	23	1.134.580.127	88	27,90	50,00	5.051.844.593,91	192,31	109,73
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah peserta pembinaan bimbingan teknis implementasi peraturan perundangan	orang	1,00	0	55	-	-	0	-	0	-	-	-	-	0,00	0,00	0	0,00	1,00	-	1,82	-	
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	orang	55	0	55	-	0	0	0	0	-	-	-	-	0	0	0	0	0,00	55,00	-	100,00	-
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah komponen instansi listrik dan peralatan serta perlengkapan kantor / rumah tangga yang terpenuhi	jenis	15,00	220.417.664	30	270.167.308,00	0,000	1.343.018	10,000	-	10	-	-	10	-	30,00	1.343.018	100	0,50	45,00	221.760.682,00	300,00	98,81
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	paket	11	2.823.500	15	2.938.375,00	0	0	0	0	15	-	1	-	15,00	0	100	0,00	26,00	2.823.500,00	86,67	70,59	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	paket	10	0	15	-	0	0	0	0	-	-	-	-	0	-	0	0	0,00	10,00	-	66,67	-
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	paket	8	136.448.300	10	136.726.153,00	0	834.009	10	-	10	-	1	-	10,00	834.009	100	0,61	18,00	137.282.309,00	180,00	137,30	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan Yang Disediakan	paket	6	4.111.000	8	6.378.780,00	0	509.009	4	-	4	-	1	-	8,00	509.009	100	7,98	14,00	4.620.009,00	175,00	50,04	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	dokumen	1422	0	0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	0	-	0	0	0,00	1422,00	-	74,84	-
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	laporan	245	77.034.864	600	124.124.000,00	100	-	200	-	200	-	1	100	-	600,00	0	100	0,00	845,00	77.034.864,00	140,83	92,84
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jasa Operasional yang	orang	93	1.820.339.164	46	1.861.674.000,00	46,00	443.665.290	46,00	-	46	-	-	46	-	46,00	443.665.290	100	23,83	46,00	2.264.004.454,00	100,00	179,86
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	laporan	9	107.995.304	3	143.916.000,00	3	19.455.720	3	-	3	-	1	3	-	3	19.455.720	100	13,52	12,00	127.451.024,00	400,00	116,71
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	laporan	7	1.712.343.860	43	1.717.758.000,00	43	424.209.570	43	-	43	-	1	43	-	43	424.209.570	100	24,70	50,00	2.136.553.430,00	116,28	185,86
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah fasilitas pemeliharaan yang tersedia	jenis	4,00	179.815.650	4	246.243.363,00	4,00	5.000.000	4,00	-	4	-	-	4	-	4,00	5.000.000	100	2,03	8,00	184.815.650,00	200,00	448,12
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	unit	12	53.820.500	1	76.083.000,00	1	2.500.000	1	-	-	-	1	-	1	2.500.000	100	3,29	13,00	56.320.500,00	325,00	190,12	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	unit	8	81.550.150	30	86.930.000,00	30	2.500.000	30	-	-	-	1	-	30	2.500.000	100	2,88	38,00	84.050.150,00	1.266,67	337,40	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	gedung	3	0	1	34.155.363,00	0	0	0	0	-	-	-	-	0	0	0	0	0,00	3,00	-	60,00	-
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah pemeliharaan / rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor	sarana	9	44.445.000	5	49.075.000,00	0	-	0	-	5	-	-	5	-	5	0	100	0,00	14,00	44.445.000,00	280,00	169,74

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).



Perubahan Rencana Kerja Dinas KBPPPA Tahun 2025

Peningkatan peran dan fungsi keluarga dalam pembangunan Daerah, inisiasi nilai-nilai luhur budaya Gresik, dan pembinaan karakter	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Persentase Unit Pemberi Layanan yang Telah tersosialisasi Program KKBPK	persen	100	399.786.109	100	461.400.000,00	100	33.884.482	100	-	100	-	100	-	100	33.884.482	100	
	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Jumlah Unit Pemberi Layanan Yang Sudah Tersosialisasi Program KKBPK	unit	153	69.660.500	153	112.200.000,00	153	0	153	-	153	-	153	-	153	-	100	
	Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota	dokumen	1	3.110.000	1	32.200.000,00	0	0	0	-	-	-	1		1	0	100	
	Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program Bangsa Kencana	Jumlah Laporan Rapat Pengendalian Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	laporan	0	66.550.500	4	80.000.000,00	0	0	0	0	4	-	1	4		0	100	
	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data	dokumen	43,17	330.125.609	1	349.200.000,00	0	33.884.482	0	-	1	-			1,00	33.884.482,00	100	
	Penyusunan Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	Jumlah Dokumen Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	dokumen	0	0	50	-	0	0	0	0			1		0	0	0	
	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	Jumlah laporan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan sistem	laporan	12	47.725.609	18	60.000.000,00	0	3.410.900	8	-	10	-	1	18		3.410.900	0	
	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedia	dokumen	29	0	1	-	0	-	0	-					0	0	0	
	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Jumlah laporan pencatatan dan pengumpulan data keluarga	Laporan	18	70.300.000	18	75.600.000,00	0	-	12	-	8	-	1		-	0	0	
	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah dokumen pengolahan dan pelaporan data pengendalian lapangan dan pelayanan	dokumen	18	212.100.000	12	213.600.000,00	3	30.473.582,00	3	-	3		3		0	3,00	30.473.582	25
Peningkatan peran dan fungsi keluarga dalam pembangunan Daerah, inisiasi nilai-nilai luhur budaya Gresik, dan pembinaan karakter	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Unmet Need ber-KB	persen	87	5.366.881.193	9,6	5.335.245.000	9,55	106.711.400	9,55	-	10	-	9,18	-	9	106.711.400	105	
	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Balai Penyuluh yang terfasilitasi	alai penyulu	18,000	1.095.085.293	18	1.173.000.000,00	18,00	98.261.400	18,00	-	18	-	18		0	18,00	98.261.400	100
	Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	organisasi	64	0	32		32	-	32	0	32				0	32	0	100
	Advokasi Program Bangsa kencana oleh poka advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	organisasi	-	183.834.300	32	200.000.000,00	32	59.111.400	32	-	-	-	1		32	59.111.400	100	
		Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).																	
	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK sesuai	Jumlah Dokumen Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE)	dokumen	3	0	18		1		1						0	1	0	6

[illegible]



Perubahan Rencana Kerja Dinas KBPPPA Tahun 2025

	Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Laporan Hasil Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	laporan	0		0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	-	-	-
	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Kader yang Mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	orang	187		0	0		187	-	187	-				0	187		0	0	0,00	374,00	-	50,00	-
	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	orang	2920		0	0		2920	-	2920	-				0	2920		0	0	0,00	5840,00	-	200,00	-
	Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) yang mendapatkan biaya operasional.	kelompok	90,00		0	0		0	0	0	0				0	0		0	0	0,00	90,00	-	12,59	-
	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	laporan	5		0	5		0	23490000	0	0				0	0		23.490.000	0	0,00	5,00	23.490.000,00	16,67	4,41
	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	laporan	0	95.940.000	5	98.190.000,00	0	0	3	-	2	-	1		5		0	100	0,00	5,00	95.940.000,00	83,33	13,50	
	Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	Jumlah laporan hasil pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	laporan	0	16.595.600	5	48.000.000,00					2	-	1	3	5		0	100	0,00		16.595.600,00	-	-	
	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia	unit	0	232.750.000	18	300.000.000,00				-	18	-	1		18		0	100	0,00		232.750.000,00		-	
	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	orang	0	2.255.307.600	2920	2.282.688.000,00			2920	-	2920	-	1		0		0	0	0,00		2.255.307.600,00			



Perubahan Rencana Kerja Dinas KBPPPA Tahun 2025

		Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Jumlah Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang mendapat biaya operasional kegiatan	kelompok	0	74.724.500	715	101.421.980,00			192,00	-	277	-	1	246		715,00	0	100	0,00		74.724.500,00			
		Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah desa dan kelurahan yang terfasilitasi TPK dan akses internet mobile	Desa / Kelurahan	0	6.359.270.000	356	6.363.000.000,00		26.200.000,00	356	-	356	-		356		-	356	26.200.000,00	100	0,41		6.385.470.000,00		
		Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	Laporan	0	3.029.900.000	18	3.030.000.000,00		26.200.000	6	-	6	-	1	6		18	26.200.000	100	0,86		3.056.100.000,00			
		Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	Jumlah Ketahanan Dokumen Keluarga Hasil Melalui Pengelolaan Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	laporan	0	3.329.370.000	18	3.333.000.000,00			6	-	6	-	1	6		18	0	100	0,00		3.329.370.000,00			
Jumlah Anggaran dan Realisasi Dari Seluruh Program																										
TOTAL RATA - RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d PROGRAM....)																				114,83	7,41			102,01	143,26	
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGAM (PROGRAM 1 s.d PROGRAM....)																				ST	ST			ST	ST	



Dalam kedudukannya sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Gresik, Dinas KBPPPA Kabupaten Gresik mempunyai tugas untuk membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pengendalian penduduk, keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga, serta urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Untuk melaksanakan tugas tersebut diatas, maka Dinas KBPPPA Kabupaten Gresik mempunyai fungsi organik dan tata kerja sebagai berikut:

1. Pelaksanaan, pengkoordinasian, perumusan, kebijakan teknis urusan pengendalian penduduk, keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga, serta urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
2. Pengkoordinasian pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pengendalian penduduk, keluarga berencana, ketahanan dan
3. kesejahteraan keluarga, serta urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
4. Pengkoordinasian pelaksanaan pepaduan dan sinkronisasi kebijakan, pemetaan perkiraan, advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi pengendalian penduduk, keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga, serta urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
5. Pengkoordinasian pelaksanaan pendayagunaan Tenaga penyuluh KB / Petugas Lapangan KB dan Kader KB serta pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi;
6. Pelaksanaan pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan dalam pelaksanaan pelayanan pengendalian penduduk, keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga, serta urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
7. Pengkoordinasian pelaksanaan pelayanan KB;
8. Pelaksanaan pelayanan administrasi dan pembinaan kesekretariatan dan pembinaan kelompok jabatan fungsional;
9. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.



Di Tahun 2025 Dinas KBPPPA memiliki 2 (dua) sasaran Strategis dalam mendukung Misi ke-2 RPJMD yaitu Membangun Infrastruktur Yang Berdayasaing, Memakmurkan Desa dan Menata Kota, serta Misi ke-3 yaitu Membangun Insan Unggul Yang Cerdas, Mandiri, Sehat dan Berkhakul Kharimah, dengan indikator dan target capaian kinerja sebagai berikut:


Tabel 2. 2 (T-C.30) Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

NO	Indikator	Taget Renstra				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
		2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	
1	Persentase desa yang telah mengakomodasi usulan perempuan	6 %	8 %	10 %	10 %	6,74	9,55	8 %	8 %	Angгаа kegiatan pendukung tidak tersedia di Tahun 2025, sehingga ada potensi capaian menurun
2	Persentase PD yang minimal 30% kegiatannya dilengkapi dokumen Analisa Responsif Gender (ARG)	20	25	30	30	19,64	30,43%	30	30	Telah dilakukan kunjungan ke msing-masing OPD untuk mendampingi penyusunan, sehingga meskipun anggaran tidak tersedia target mungkin masih akan tercapai
3	Total Fertility Rate (TFR)	1.9-2	1.9-2	1.9-2	1.9-2	1,89	1,94	1.9-2	1.9-2	Kegiatan pendukung didanai oleh Dana Alokasi Khusus sehingga tidak terpengaruh secara significant oleh berkurangnya anggaran dinas
4	Contraceptive Prevalency Rate (CPR)	70-76	70-76	70-76	70-76	78,42 (Th. 2021)	67,78%	67,78%	67,78%	



NO	Indikator	Target Renstra				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
		2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	
5	Persentase Usia Kawin Pertama dibawah 20 Tahun	12.15 %	12.15 %	12.15 %	12.15 %	13,65% (Th. 2021)	9,27%	9,27%	9,27%	
6	Persentase Kasus Kekerasan terhadap Perempuan yang Mendapat Layanan Komprehensif	70%	80%	90%	100%	100	100	100	100	
7	Persentase Kasus Anak dalam Situasi Khusus yang Mendapat Layanan Komprehensif	70%	80%	90%	100%	100	100	100	100	
8	Tingkat Kematangan Layanan sesuai Standar SPBE	1	2	2	3	2	2	2	2	

**Tabel 2.3 Target Indeks Pembangunan Gender di Kabupaten Gresik**

URAIAN	TAHUN					
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
INDEKS KUALITAS AIR (IKA)	50,1	50,2	50,3	50,4	50,5	50,6

Sasaran Dinas KBPPPA Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026 dapat terlihat pada tabel dibawah yaitu :

Tabel 2.4 Target Sasaran Strategis di Dinas KBPPPA Tahun 2021-2026

NO	Indikator	Target Renstra					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Persentase desa yang telah mengakomodasi usulan perempuan	2%	4%	6%	8%	10%	10%
	Persentase PD yang minimal 30% kegiatannya dilengkapi Dokumen Analisa Responsif Gender (ARG)	10%	15%	20%	25%	30%	30%
3	Total Fertility Rate (TFR)	1.9-2	1.9-2	1.9-2	1.9-2	1.9-2	1.9-2
4	Contraceptive Prevalency Rate (CPR)	70-76%	70-76%	70-76%	70-76%	70-76%	70-76%
5	Persentase Usia Kawin Pertama dibawah 20 Tahun	<12.15 %	<12.15 %	<12.15 %	<12.15 %	<12.15 %	<12.15 %
6	Persentase Kasus Kekerasan terhadap Perempuan yang Mendapat Layanan Komprehensif	70%	80%	90%	100%	100%	100^
7	Persentase Kasus Anak dalam Situasi Khusus yang Mendapat Layanan Komprehensif	70%	80%	90%	100%	100%	100^
8	Tingkat Kematangan Layanan sesuai Standar SPBE	Level 1	Level 1	Level 2	Level 2	Level 2	Level 3



2.2 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD

Sebagai organisasi yang dinamis mengikuti perkembangan kondisi dan peraturan perundangan yang berlaku, Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gresik dalam menjalankan tugas dan fungsinya juga menghadapi permasalahan-permasalahan. Permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya antara lain :

Permasalahan terkait kepegawaian:

- Belum ada mekanisme rekrutmen serta manajemen kepegawaian untuk tenaga non PNS pendamping kasus untuk menjalankan tugas dan fungsi perlindungan khusus anak serta perlindungan perempuan. Layanan ini membutuhkan SDM dengan kualifikasi dan pembiayaan yang khusus;
- Dinas KBPPPA Kabupaten Gresik memiliki kader di setiap RW, namun belum memiliki mekanisme yang efektif untuk transfer informasi dan peningkatan kapasitas;
- Permasalahan terkait Keluarga Berencana:
- Persentase kebutuhan ber KB yang tidak terpenuhi (Unmet Need) 13,88% (Target SPM 5 %)
- Persentase KB Baru Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) 19,5% (Target SPM 25 %)
- Presentase Peserta KB Baru Pria 2,27 % (Target SPM 3,1 %);
- Permasalahan terkait Pengendalian Penduduk:
- Rasio petugas penyuluh KB belum sesuai dengan SPM. 1 PKB berbanding 4- 5 desa / kelurahan. SPM 1 PKB berbanding 1-2 desa / kelurahan
- Permasalahan terkait Keluarga Sejahtera:
- Masih tingginya cakupan PUS yang istrinya dibawah usia 20 tahun
- Belum tercapainya cakupan anggota BKB, BKR, BKL dalam rangka program ketahanan dan pemberdayaan keluarga
- Masih rendahnya upaya pelayanan dan pembinaan ketahanan Keluarga
- Permasalahan terkait Pemberdayaan dan peningkatan peran perempuan dalam pembangunan:
- Jumlah anggaran Perangkat Daerah yang sudah responsive gender belum mencapai 30% dari APBD;



- Jumlah desa yang melibatkan kelompok perempuan dalam musrenbang desa belum mencapai 30% dari jumlah desa;
- Usulan perempuan sebagaimana disusun dalam musrenbang perempuan belum diakomodasi dalam perencanaan regular. Belum ada mekanisme untuk mengintegrasikan hasil musrenbang perempuan kedalam penentuan kegiatan prioritas;
- Indeks Pembangunan Gender (IPG) meningkat namun relatif rendah dibandingkan kondisi ideal sebesar 100;
- Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) relatif rendah dibandingkan kondisi ideal sebesar 100;
- Kesenjangan pendapatan antara laki-laki dan perempuan tergolong tinggi, terlihat dari pendapatan yang diperoleh penduduk laki-laki dan penduduk perempuan.
- Permasalahan terkait Peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan:
- Belum ada SOP Terpadu untuk penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan perlindungan khusus anak;
- Belum ada shelter yang layak sebagai tempat tinggal sementara perempuan dan anak yang menjadi dampingan dinas;
- Layanan Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak belum memiliki unit teknis yang berbentuk UPT;
- Belum ada mekanisme pembiayaan dan kepegawaian terkait operasional layanan;
- Kabupaten Gresik belum memenuhi indikator yang dibutuhkan untuk mewujudkan kabupaten yang layak anak;
- Masih terjadi perkawinan anak;



BAB III

RENCANA KERJA & PENDANAAN

3.1 Program dan Kegiatan

Sesuai dengan hasil forum SKPD ditetapkan Dinas KBPPPA Kabupaten Gresik Tahun 2025 merencanakan akan melaksanakan Kegiatan beserta Pendanaannya sebagaimana terdapat pada table 3.1



TABEL 3.1 RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
(RENJA OPD) DINAS KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KAB. GRESIK
TAHUN 2025

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIOD E RENSTR A OPD	REALISA SI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAA N CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPO K SASARA N	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUN G JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkuran g (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGE T	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELU M	SESUDA H	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONA L	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		DINAS KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK								22.684.833.321,00	22.649.535.085,04	22.515.008.307,23	-169.825.013,77						255.698.000,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							22.684.833.321,00	22.649.535.085,04	22.515.008.307,23	-169.825.013,77							255.698.000,00	
	2.08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK							1.611.329.960,00	1.435.693.960,09	1.275.162.380,03	-336.167.579,97							0,00	
1.	2.08.02	PROGRAM PENGARUSUTAMAA N GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	-				-	-	197.612.075,00	252.298.075,00	176.100.498,50	-197.612.075,00							0,00	
	2.08.02.2.01	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	-				-	-	0,00	54.686.000,00	34.130.710,00	34.130.710,00			-	Peningkata n kualitas pelayanan kesehatan yang inklusif, ramah anak dan responsif gender Peningkata n kualitas pelayanan kesehatan yang inklusif,	-		0,00	DINAS KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK



																ramah anak dan responsif gender				
	2.08.02.2.01.0006	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG kewenangan Kab/Kota																		
			Jumlah SDM yang memperoleh advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG				55 Orang	75 Orang	0,00	54.686.000,00	34.130.710,00	34.130.710,00	Kab. Gresik, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Gresik, Kebomas, Dahanrejo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan yang inklusif, ramah anak dan responsif gender			0,00	DINAS KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.02.2.02	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	-				-	-	0,00	0,00	0,00	0,00			-	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan yang inklusif, ramah anak dan responsif gender	-		0,00	DINAS KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.02.2.02.0002	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi																		



			Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota				17 Organisasi	17 Organisasi	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Gresik, Kebomas , Dahanrejo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan yang inklusif, ramah anak dan responsif gender	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan yang inklusif, ramah anak dan responsif gender		0,00	DINAS KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.02.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	-				-	-	197.612.075,00	197.612.075,00	141.969.788,50	-55.642.286,50			-	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan yang inklusif, ramah anak dan responsif gender	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan yang inklusif, ramah anak dan responsif gender		0,00	DINAS KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.02.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas				675 Orang	300 Orang	197.612.075,00	197.612.075,00	141.969.788,50	-55.642.286,50	Kab. Gresik, Kebomas , Dahanrejo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan yang inklusif, ramah anak dan responsif gender	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan yang inklusif, ramah anak dan responsif gender		0,00	DINAS KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK



																responsif gender				
2.	2.08.03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	-				-	-	229.343.366,00	436.611.860,09	396.908.252,09	-229.343.366,00							0,00	
	2.08.03.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	50.750.000,00	65.000.000,00	65.000.000,00	14.250.000,00			-	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan yang inklusif, ramah anak dan responsif gender	-		0,00	DINAS KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.03.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota				10 Dokumen	1 Dokumen	50.750.000,00	65.000.000,00	65.000.000,00	14.250.000,00	Kab. Gresik, Kebomas, Dahanrejo	DAK NON FISIK-DANA PELAYANAN PEREMPUAN DAN ANAK	-	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan yang inklusif, ramah anak dan responsif gender	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan yang inklusif, ramah anak dan responsif gender		0,00	DINAS KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK



	2.08.03.2.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	-				-	-	107.239.000,00	277.239.000,00	237.535.392,00	130.296.392,00			-	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan yang inklusif, ramah anak dan responsif gender Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan yang inklusif, ramah anak dan responsif gender	-		0,00	DINAS KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.03.2.02.0001	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota																		



PENUTUP

Demikian Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gresik Tahun 2025 ini disampaikan kepada Bupati Gresik sebagai wujud pertanggungjawaban Satuan Kerja Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Bupati Gresik Nomor 27 Tahun 2025 Tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2025.